



ABSTRAK

Tulisan "Profil Pekerja Wanita di Sektor Industri Pengolahan Skala Besar; Kasus Di Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang" bertujuan untuk mengetahui karakteristik pekerja dan pekerjaan pekerja wanita di sektor industri pengolahan skala besar di kelompok industri yang berbeda. Lebih jauh lagi untuk mengetahui perbedaan upah dan faktor-faktor yang mempengaruhi upah di kelompok industri pakaian dan non pakaian.

Penelitian yang dilakukan di desa Leyangan, kecamatan Ungaran, kabupaten Semarang ini menggunakan metode sensus, pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan. Pengolahan data menggunakan program SPSS/PC+v4. Untuk mencapai tujuan penelitian digunakan tehnik analisa tabel frekuensi dan silang, tabel *mean*, uji kai kuadrat, dan korelasi *product moment*. Respondennya adalah pekerja wanita yang bekerja di sektor industri pengolahan skala besar. Jumlah responden 159 pekerja, dimana 78 responden bekerja di kelompok industri pakaian dan 81 responden di kelompok industri non pakaian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan pekerja di sektor industri pengolahan skala besar berada di: **pertama**, kelompok industri pakaian (ISIC 32) yang terdiri atas sub sektor industri garmen (21,4%), sub sektor industri tekstil (25,8%) dan sub sektor industri kulit (1,9%). **Kedua**, kelompok industri non pakaian meliputi: (ISIC 31) kelompok makanan, minuman (14,5%), (ISIC 33) kelompok industri kayu dan barang dari kayu (5,7%), (ISIC 35) kelompok industri kimia, plastik dan karet (30,2%) dan ISIC 36 kelompok industri bahan galian bukan logam (0,6%).

Di kelompok industri pakaian mencerminkan keterlibatan pekerja dalam proses produksi yang lebih besar daripada kelompok industri non pakaian. Perbedaan tersebut didekati dengan indikator industri pengolahan, **pertama**; perbandingan pekerja per perusahaan, **kedua**; produktivitas per pekerja.

Walaupun rata-rata pekerja wanita di kelompok industri pakaian bekerja lebih lama daripada di kelompok industri non pakaian, tetapi hasil analisa data menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan upah yang nyata antara pekerja wanita pada kedua kelompok industri tersebut. Hal ini mengilustrasikan, **pertama**, bahwa keterlibatan dalam proses kerja yang lebih besar oleh pekerja wanita di kelompok industri pakaian belum secara tegas mempengaruhi tingkat upah. **Kedua**, *missmatch* jam kerja dengan upah, cenderung lebih besar kemungkinan terjadi atau lebih terlihat di industri pakaian.

Hasil analisa data menunjukkan di kelompok industri pakaian upah dengan umur menunjukkan hubungan positif yang bermakna, tetapi tidak bermakna di kelompok industri non pakaian. Untuk hubungan jam kerja dan upah menunjukkan perbedaan besar pengaruh. Dimana terdapat hubungan positif yang bermakna antara jam kerja dan upah pada kedua kelompok industri. Tetapi kecenderungan hubungan tersebut lebih kuat di kelompok industri non pakaian daripada di kelompok industri pakaian. Hubungan positif yang bermakna juga terjadi antara lama kerja dan upah di kedua kelompok industri. Tetapi kecenderungan hubungan tersebut lebih kuat di kelompok industri pakaian daripada non pakaian. Pada kelompok industri pakaian, pekerja wanita yang berstatus kawin mempunyai tingkat upah yang lebih tinggi daripada yang belum kawin.

Dengan demikian kebijakan penentuan upah lebih bijaksana apabila juga mengantisipasi perbedaan keterlibatan pekerja dalam proses produksi per kelompok dan sektor industri. Lebih lanjut tidak adanya perbedaan upah antar kelompok industri terkait dengan UMR yang berlaku secara regional. Secara normatif maksud pengaturan ketentuan upah minimum adalah jaring pengaman agar pemilik modal tidak sewenang-wenang membayar upah para buruhnya. Tetapi dalam prakteknya ketentuan upah minimum justru merupakan legitimasi pemilik modal untuk tidak beranjak terlalu jauh dari tingkat upah minimum dalam memberikan upah kepada pekerja.